

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik pemerintah dan temuan audit BPK RI terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan analisis data dan pembahasan di dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah (LKPD) Provinsi tahun 2012-2014 adalah sebesar 52,74%
2. Variabel karakteristik daerah dan temuan audit BPK RI berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi.
3. Ada dua variabel karakteristik daerah, yaitu ukuran pemerintah daerah dan *intergovernmental revenue* yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD Provinsi. Sedangkan dua variabel lainnya, yaitu kekayaan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh.
4. Kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kekayaan suatu pemerintah daerah tidak akan secara otomatis mendorong pemerintah

untuk mengungkapkan secara lengkap item-item pengungkapan pada laporan keuangan.

5. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi. Hal ini menunjukkan semakin besar ukuran pemerintah maka semakin besar atau tinggi tingkat pengungkapan wajib LKPD Provinsi.
6. Rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat rasio kemandirian keuangan daerah tidak akan secara otomatis memengaruhi tingginya pengungkapan wajib LKPD Provinsi.
7. *Intergovernmental revenue* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *intergovernmental revenue* suatu pemerintah daerah maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan wajib LKPD Provinsi.
8. Temuan audit BPK RI berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah temuan audit BPK RI, maka akan semakin banyak pula item-item pengungkapan wajib yang diungkapkan dalam LKPD Provinsi.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, dapat diperoleh keterbatasan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti hanya menggunakan data LKPD Provinsi tahun anggaran 2012-2014 (jangka waktu pendek), sehingga kurang dapat mengamati tingkat pengungkapan wajib LKPD Provinsi.
2. Peneliti hanya mengambil sampel LKPD Provinsi, sementara masih banyak jenis LKPD pemerintah daerah yang lainnya, misalnya LKPD Kabupaten/Kota, LKPD Kementrian/Lembaga.
3. Peneliti hanya berfokus pada *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib), sementara jenis pengungkapan LKPD ada dua, yaitu *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela).
4. Perhitungan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dihitung dengan melakukan *checklist* yang berdasarkan pertimbangan subyektif atau opini dari peneliti. Hal ini memungkinkan akan diperoleh hasil yang berbeda antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain untuk sampel dan periode pelaporan LKPD Provinsi yang sama.
5. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini hanya menjelaskan sebagian kecil dari karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit yang mempengaruhi pengungkapan wajib LKPD Provinsi yang berarti masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan tingkat pengungkapan LKPD yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian dikarenakan keterbatasan waktu.

C. Saran

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka diberikan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data LKPD dalam pengamatan yang lebih panjang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dari praktik pengungkapan LKPD di Indonesia.
2. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih luas, misalnya dengan menambah serta mengombinasikan antara LKPD Provinsi, LKPD Kabupaten/Kota dan LKPD Kementrian/Kelembagaan, sehingga dapat ,memberikan gambaran yang lebih luas dari praktik pengungkapan LKPD di Indonesia.
3. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada *mandatory disclosure* saja, tetapi juga berfokus pada *voluntary disclosure*. Sehingga dapat memberikan gambaran lebih lengkap dan andal dari praktik pengungkapan LKPD di Indonesia.
4. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan teknik perhitungan kepatuhan pengungkapan lain yang dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan obyektif, bukan berdasarkan pada penilaian subyektif seperti pada teknik *checklist*.
5. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel berupa faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD, misalnya untuk karakteristik pemerintah daerah:

jumlah penduduk, jumlah SKPD, total pembiayaan dan lain-lain. Untuk temuan audit, misalnya: opini audit dan nominal penyimpangan.

6. Bagi instansi terkait (pemerintah daerah), penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan pengungkapan laporan keuangannya terhadap SAP. Berdasarkan penelitian ini dijelaskan bahwa pemerintah daerah merupakan *steward* (pelayan). Sebagai *steward* sudah seharusnya pemerintah daerah mengungkapkan informasi-informasi yang terkait dengan kinerjanya secara vertikal (pemerintah pusat) maupun horizontal (masyarakat). Pengungkapan tersebut merupakan wujud transparansi, akuntabilitas dan sebagai salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada *principal*. Dengan demikian penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran pemerintah daerah selaku *steward* tentang kewajibannya untuk mengungkapkan informasi-informasi keuangan sesuai SAP dalam rangka transparansi dan akuntabilitas.
7. Bagi pemerintah pusat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, masukan dan pertimbangan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah berkaitan dengan pengungkapan wajib yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Dengan demikian, pemerintah pusat bahkan dapat menerapkan *punishment* maupun *reward* terhadap hal tersebut sesuai dengan SAP.

8. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak seharusnya masyarakat hanya acuh terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Selaku *principal*, masyarakat seharusnya ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan dan kepedulian dari masyarakat akan ada kemungkinan pemerintah daerah termotivasi untuk meningkatkan kualitas laporannya.